

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan konsumsi sudah bukan menjadi suatu perilaku yang asing untuk diperbincangkan. Namun kegiatan konsumsi dapat menjadi suatu bentuk representasi perilaku yang berbeda ketika dilakukan dan ditunjukkan oleh seseorang yang berasal dari kelas tertentu sebagai suatu simbol bagi kedudukan mereka dalam tatanan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut secara sadar ataupun tidak disadari oleh pelaku membawa mereka pada suatu bentuk identitas yang dilabelkan oleh masyarakat sebagai bentuk representasi tingkah laku konsumsi kelas tertentu.

Gambaran mengenai tingkah laku konsumsi sebagai bentuk representasi keberadaan struktur kelas sosial dalam masyarakat Yogyakarta pada dasarnya telah kasat mata terlihat sejak berdiri dan diakuinya kekuasaan keraton dalam struktur sosial masyarakat Yogyakarta. Namun, karena ideologi yang berada di balik konstruksi kelas pada masa itu lebih dilihat dari sudut pandang *alus* dan *kasar* untuk membedakan antara kaum priyayi dengan rakyat biasa, maka tingkah laku konsumsi hanya digunakan sebagai simbol pendukung untuk memperkuat identifikasi kasat mata posisi kelas sosial.¹

¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Pustaka Jaya, Jakarta, 1960, hal. 311.

Wujud representasi tingkah laku konsumsi pada masa itu tampak pada perbedaan penggunaan bahasa, penggunaan pakaian, dan penggunaan kendaraan, seperti kereta beroda emas, yang memberi batas sekaligus membedakan konsumsi para priyayi dengan rakyat biasa², serta adanya pelaksanaan upacara adat (ritual) khusus yang hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton, termasuk juga konsumsi hiburan, seperti tarian, gamelan ataupun kesenian lainnya yang hanya boleh dikonsumsi oleh kaum priyayi.

Dalam penggunaan bahasa, para bangsawan dan *abdi dalem* ini cenderung mengkonsumsi bahasa yang sifatnya *alus*. Bahasa yang digunakan khusus untuk dalam lingkungan keraton adalah bahasa *bagongan* atau *basa kedhaton*. Hal tersebut digunakan untuk menumbuhkan rasa persatuan antara priyayi dan *abdi dalem*, terkecuali untuk pribadi Sultan dan putra mahkota³ dan untuk di luar wilayah lingkungan keraton, aturan adat yang berlaku mengenai gaya bahasa Jawa bertingkat (*krama hinggil, krama madya, serta ngoko*) tetap berlaku untuk umum sebagai upaya pembedaan dan penghormatan kepada golongan ini oleh masyarakat di bawahnya.

Salah satu dari beberapa variabel lainnya yang cukup memperlihatkan tingkah laku konsumsi yang merepresentasikan identitas dan kelas seseorang pada waktu itu terlihat dari penggunaan busana. Dalam lingkungan keraton penggunaan busana memiliki berbagai aturan tersendiri. Aturan penggunaan ini berbeda bagi kalangan

² Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, 1981, hal. 104.

³ Mari S. Condronegoro, *Busana Adat Kraton Yogyakarta: Makna dan Fungsi dalam Berbagai Upacara*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 1995, hal. 9.

yang berada di dalam keraton dan dibedakan pula berdasarkan tingkatan usia dan penggunaannya dalam suatu upacara adat keraton.

Ketentuan tentang tata busana bangsawan dimulai ketika seorang anak berusia balita dan dibedakan penggunaan antara busana pria dan wanita. Salah satu representasi tingkah laku konsumsi busana bagi anak perempuan disebut busana *sabukwala*. Rangkaian busana ini digunakan sebagai busana harian atau untuk menghadiri upacara *alit*, terdiri dari *nyamping batik*, baju katun, ikat pinggang berupa *kamus songketan* bergambar flora atau fauna, memakai *lonthong batik* bermotif *tritik*, mengenakan *cathok* dari perak berbentuk kupu-kupu, garuda atau merak, dan perhiasan yang dipakainya terdiri dari *subang*, kalung emas dengan liontin berbentuk mata uang (dinar), gelang berbentuk ular atau *gligen*, atau dapat pula menggunakan gelang model *sigar penjalin*.⁴

Gambaran identitas yang menandakan anak perempuan tersebut sebagai anggota dari kelas atas dengan segala atribut pelengkapny merepresentasikan suatu bentuk tingkah laku konsumsi yang telah disosialisasikan oleh golongan atas dalam masyarakat sejak usia anak-anak dan berbeda pula pada tingkat usia selanjutnya hingga menikah.

Bentuk lain dari suatu representasi tingkah laku konsumsi yang tercermin dalam masyarakat dulu yang diperlihatkan oleh golongan atas dalam struktur masyarakat ini terlihat pada upacara-upacara adat yang terbagi menjadi dua, yaitu upacara *alit* (upacara yang bersifat kekeluargaan) dan upacara *ageng* (upacara resmi

⁴ *Ibid*, hal. 22.

kerajaan) dalam upacara seperti *labuhan*, *maleman*, *garebeg*, *supitan*, dan upacara perkawinan.⁵ Bukanlah tidak mungkin dikatakan sebagai suatu pengeluaran yang jumlahnya relatif besar, apabila dilihat dari banyaknya upacara-upacara yang dilaksanakan oleh keraton maupun perorangan dan ditambah lagi oleh tuntutan prestise sosial yang selalu dibawa oleh kalangan ini sebagai upaya untuk mendapat penghormatan dan pengakuan kedudukannya dalam masyarakat sehingga mereka harus selalu membedakan dirinya dengan golongan lainnya.

Tingkah laku konsumsi kemudian identik dan cenderung terlihat pada lingkungan keraton saja, dan hal ini sangat nyata tersosialisasi kepada segenap priyayi dan *abdi dalem*⁶ dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di lingkungan dalam keraton maupun di luar keraton. Sedangkan masyarakat biasa lebih melakukan dan merepresentasikan tingkah laku konsumsi mereka di luar berbagai aktivitas yang dilakukan kalangan keraton. Berbagai keistimewaan dalam tingkah laku konsumsi lingkungan keraton ini semakin terlanggengkan dan mendapat pengakuan dalam masyarakat oleh karena diberlakukannya hukum-hukum dan kebijakan keraton dalam penggunaannya, sehingga tidak dapat ditiru oleh anggota golongan lainnya.

Bentuk-bentuk dari representasi tingkah laku konsumsi pada waktu itu secara tidak langsung telah dikonstruksikan berdasarkan struktur kelas sosial yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hal. 13. "Komunitas Kraton secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok sosial, yaitu para bangsawan dan *abdi dalem*. Perbedaan kedua lapisan itu dapat dilihat dari adanya perbedaan pangkat, kedudukan, pakaian, simbol, dan tanda kebesaran, serta sistem komunikasinya. Lapisan sosial kaum ningrat atau bangsawan terjadi karena alasan keturunan, pengangkatan, atau jabatan birokrasi tingkat atas yang disebut priyayi. Sedangkan *abdi dalem* adalah semua pejabat kerajaan dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang dalam kehidupannya banyak tergantung pada raja".

terlegitimasi oleh pemegang kekuasaan, yaitu keraton. Dengan demikian, hal yang menarik ketika melihat representasi tingkah laku konsumsi dalam struktur kelas sosial masyarakat Yogyakarta pada masa lalu terletak pada tidak terbukanya peluang bagi masyarakat yang berada pada posisi bawah (*wong cilik*) untuk melakukan perjuangan posisi kelas melalui representasi tingkah laku konsumsi karena ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada waktu itu.

Pada perkembangannya, ketika konstruksi kelas sosial yang telah terstruktur terbongkar oleh munculnya berbagai pemikiran-pemikiran baru tentang konsepsi dan representasi struktur kelas sosial sebagai akibat dari perkembangan ranah pendidikan yang melahirkan kaum intelektual (terpelajar) beserta pergeseran struktur kekuasaan, maka terjadi pergeseran dalam struktur sosial masyarakat Yogyakarta secara umum dan secara khusus yang berdampak pula pada pergeseran orientasi konsumsi kelas sosial.

Kedadaan ini kemudian berdampak pada munculnya berbagai peluang dalam perjuangan posisi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan yang salah satunya diperlihatkan melalui tingkah laku konsumsi sebagai upaya membedakan kedudukan sosial seseorang (kelompok) masyarakat. Secara tidak langsung, tingkah laku konsumsi menjadi suatu hal yang diperjuangkan oleh setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh atau mempertahankan identitas kelas sosial. Hal ini tentu saja menggeser konstruksi lama yang menempatkan pandangan *alus* dan *kasar* atau *priyayi* dan rakyat biasa sebagai pembeda posisi sosial masyarakat Yogyakarta.

Para aktor yang menjadi pelopor dalam menyumbangkan gaya hidup konsumtif yang direpresentasikan melalui tingkah laku konsumsi ini adalah kaum terpelajar yang pada waktu itu mendapat tempat sebagai golongan menengah baru dalam struktur masyarakat dan pengusaha-pengusaha pribumi (wiraswasta) yang semakin banyak muncul pada awal kemerdekaan Indonesia.⁷ Suatu bentuk representasi dalam tingkah laku konsumsi kemudian mendapat tempat untuk menggambarkan representasi identitas kelas sosial di Yogyakarta.

Keadaan ini semakin terlanggengkan dan mendapat pengakuan masyarakat ketika berbagai kebijakan yang disosialisasikan oleh pemerintah Yogyakarta setelah keraton berintegrasi dengan pemerintah pusat, yang salah satunya terkait dengan kebijakan Sultan membentuk golongan wiraswasta Yogyakarta yang konsumtif.⁸ Di sisi lain, kebijakan liberalisasi ekonomi Pemerintah Orde Baru yang membuka dan memperbanyak investasi-investasi modal dalam negeri maupun asing yang berdampak pula pada semakin berkembangnya industri dan media di dalam negeri.

Suatu bentuk representasi keberadaan industri dan media tersebut terutama terlihat dari menjamurnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang ditunjukkan dengan keberadaan mall-mall, serta maraknya kemunculan televisi swasta dengan berbagai bentuk sosialisasi programnya kepada masyarakat. Kedua hal tersebut memiliki peran yang cukup dominan dalam mensosialisasikan gaya hidup modern yang direpresentasikan lewat berbagai bentuk

⁷ Selo Soemardjan, *Op. cit.*, hal. 250.

⁸ *Ibid*, hal. 236.

tingkah laku konsumsi dan aktivitas yang menunjang pengakuan kolektif terhadap identitas suatu kelas sosial hingga saat ini, yang secara tidak langsung juga tersosialisasi dalam representasi kelas menengah di Yogyakarta.

Berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, mengantarkan penulis untuk melihat lebih jauh mengenai representasi suatu identitas yang ditunjukkan oleh kelas menengah di Yogyakarta saat ini. Dalam hal ini, peneliti mengaitkan representasi identitas tersebut dengan tingkah laku konsumsi mereka sebagai kelas menengah. Hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkhususkan untuk melihat representasi identitas kelas menengah yang dilihat dari tingkah laku konsumsinya, meskipun representasi identitas kelas sosial melalui tingkah laku konsumsi sebenarnya telah ada sejak dulu. Kedua, peneliti melihat bahwa globalisasi yang tercermin dalam perkembangan industri dan media tidak dapat dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pula kelas menengah di Yogyakarta, sehingga menarik untuk melihat bagaimana budaya yang disosialisasikan oleh media memiliki peran dalam membentuk dan mensosialisasikan gaya hidup modern dalam tingkah laku konsumsi kelas menengah di Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil yang lebih cermat, maka penelitian ini akan dibatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan (relasi) antara tingkah laku konsumsi dengan pembentukan kelas menengah di Yogyakarta?
2. Bagaimana kelas menengah di Yogyakarta mengkonstruksikan identitas melalui tingkah laku konsumsi?

Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba melihat perilaku konsumsi selalu berhubungan dengan kelas sosial yang pada akhirnya akan membangun identitas kelas.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui hubungan antara tingkah laku konsumsi dengan kelas menengah di Yogyakarta.
2. Meneliti pengaruh tingkah laku konsumsi terhadap pembentukan identitas kelas menengah di Yogyakarta.
3. Mengidentifikasi kelas menengah Yogyakarta yang terbentuk oleh karena adanya pengaruh tingkah laku konsumsi.

D. Kerangka Teori

Setiap masyarakat, kebudayaan dan kelompok manusia yang hidup dalam suatu kelompok kolektif memiliki konsep atau cara yang berbeda-beda dalam memandang suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Bagaimana cara seseorang dapat memandang dan mengakui keberadaan fenomena tersebut pada akhirnya memerlukan suatu proses sosialisasi sebagai suatu bentuk proses pembelajaran dalam diri individu tersebut.

Keadaan tersebut juga berlaku apabila melihat suatu bentuk representasi tingkah laku konsumsi yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Tingkah laku konsumsi yang direpresentasikan tersebut tidak tersosialisasi dalam diri mereka secara alami, tetapi merupakan suatu proses sosialisasi yang dilakukan terus menerus dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang disadari ataupun tidak disadari oleh para aktor sebagai suatu representasi identitas mereka oleh kolektif.

Perilaku konsumsi seseorang berhubungan erat dengan selera, di mana selera tersebut ditentukan dan diorganisasi sesuai dengan posisi sosialnya dalam masyarakat. Di balik selera yang ditentukan oleh pendapatan, semua praktik yang terkait dengan kegiatan budaya tidak dapat dilepaskan dari sistem representasi khas

suatu kelompok sosial dari posisi mereka dalam masyarakat dan dari keinginan mereka menempatkan diri pada tangga kekuasaan.⁹

Untuk dapat menempatkan diri dalam tangga kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan tersebut dibutuhkan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam upaya untuk membedakan diri dari kelas-kelas sosial lain sehingga legitimasi kekuasaan yang mendapat pengakuan kolektif oleh masyarakat dapat dicapai. Strategi yang dapat menunjang dalam penempatan posisi dalam struktur masyarakat cenderung ditunjukkan oleh bentuk representasi dalam tingkah laku konsumsi yang sebenarnya telah ada dalam masyarakat sejak dahulu.

Untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut, penulis mencoba menggunakan teori-teori yang menggambarkan kelas sosial dalam masyarakat, di mana terdapat suatu bentuk hubungan-hubungan kekuasaan (dominasi) yang tersembunyi antara kelas yang berkuasa untuk mendominasi dan kelas yang didominasi dalam bentuk strategi-strategi dengan pendekatan terhadap tingkah laku konsumsi sebagai suatu bentuk representasi selera kelas.

D.1 Definisi Kelas Sosial : Karl Marx dan Max Weber

Karl Marx mendeskripsikan dasar atau fundamen suatu masyarakat terletak dalam kehidupan materiilnya.¹⁰ Kehidupan materiil ini diperoleh ketika seseorang

⁹ Haryatmoko, *Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Bourdieu: Menyikap Kepalsuan Budaya Penguasa*, Majalah Basis, No. 11-12, Tahun ke-52, November-Desember, 2003, hal. 20.

¹⁰ Jeans Francois Dortier, *Max Weber (1864-1920): Sosiologi Modernitas*, dalam Giddens, Antony, et.al, *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, terj. Ninik Rochani Sjams, Yogyakarta, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 23.

bekerja. Dengan bekerja manusia menghasilkan produk untuk diri sendiri dalam wujud penghasilan dan produk untuk masyarakat berupa tenaga kerja produksi seperti manusia, mesin, teknik dan sebagainya serta hubungan produksi seperti perbudakan, sistem bagi hasil, sistem kerajinan tangan, bekerja upahan dan sebagainya.

Berdasarkan cara menghasilkan produk, masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial yang ditentukan oleh posisi ekonomi, status, penghasilan dan posisi kekuasaan kelompok masyarakat. Posisi sosial seseorang tergantung pada hubungannya dengan alat-alat produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Marx mendefinisikan kelas sosial ditentukan oleh pengelompokan individu berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat produksi.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat dibagi atas dua kelas utama, yaitu pemilik dan pengendali alat produksi (kaum borjuis) dan kaum pekerja (proletar) yang tidak memiliki alat produksi. Dengan demikian para pemilik sumber-sumber kekayaan alam dan pabrik-pabrik (kaum borjuis) akan menduduki kelas sosial yang tinggi sedangkan kaum pekerja (proletar) rendah.

Cara berproduksi sendiri mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Dinamika perkembangan ini mengantar pada suatu tingkat tertentu di mana tenaga produksi terlibat konflik dengan hubungan produksi dan menyebabkan “era revolusi sosial”, di mana masyarakat bergerak dalam satu konflik sentral berupa perjuangan kelas antara kelas borjuis dan kelas proletar.¹²

¹¹ Piötr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta, 2005, hal. 200.

¹² Jean Francois Dortier, *Op. cit.*, hal. 28.

Bagi Marx, konflik yang terjadi antara kelas-kelas ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan.¹³ Di satu sisi kaum borjuis terus mengendalikan pemerintahan, gereja, lembaga-lembaga pendidikan, sedangkan di pihak lain kaum proletar akan segera menyadari keadaan diri mereka sebagai kelas atau golongan yang telah dieksploitasi oleh kaum borjuis. Keadaan ini akan mendorong mereka menyiapkan revolusi untuk menyingkirkan kaum borjuis, mendirikan dan menyelenggarakan pemerintahan kaum proletar dengan masyarakat tanpa kelas.

Stratifikasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marx, tidak hanya terjadi pada zaman kerajaan yang membagi kedudukan sosial masyarakat menurut kepemilikan dan kekuasaannya (raja dengan hambanya), tetapi kedudukan sosial tersebut juga berlaku pada zaman industri modern yang berkembang pada masyarakat saat ini.

Marx melukiskan perubahan sejarah melalui tiga tahap. Proses perubahan bermula di tingkat tindakan individual. Tindakan individual menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan sejarah. Dalam tindakannya, individu harus menyadari kondisi struktural di sekitar mereka. Kesamaan kepentingan ekonomi mempersatukan orang menjadi sebuah kelas sosial dan sekaligus mempertentangkan mereka dengan anggota kelas sosial lain. Untuk mempertahankan kepentingan ekonomi, kelas sosial memasuki perjuangan kelas dengan kelas yang berlawanan. Kelas yang progresif, yakni yang berkepentingan mengembangkan "kekuatan produktif" (teknologi *modern*), akan lebih unggul. Mereka menciptakan sistem

¹³ Bruce J.Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. hal. 254.

produksi baru dan kelas lain terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang baru tersebut.¹⁴

Dalam perkembangannya, untuk menganalisa kelas pada zaman industri modern ini, salah seorang penerus Marx yang disebut sebagai neomarxis, yaitu Poulantzas mengusulkan untuk mengedepankan konsepsi orisinal Marx tentang kelas pada dirinya sendiri dan kelas untuk dirinya sendiri dengan cara mempostulatkan kelas sebagai suatu relasi sosial yang tersusun dari tiga wilayah aktivitas, yaitu ekonomi, politik, ideologi yang masing-masing kemudian menjadi dimensi-dimensi kelas yang berhubungan. Dalam wilayah ekonomi, relasi sosial produksi mendominasi. Dalam wilayah politik, relasi subordinasi dan dominasi di tempat kerja merupakan hal yang penting, sementara dimensi ideologis membedakan antara bentuk-bentuk kerja yang bersifat mental dengan yang manual, antara kemampuan untuk melakukan kontrol melalui “pengetahuan seorang ahli dan rahasia” dengan ketidakmampuan untuk “mengetahui” yang terefleksikan dalam pekerjaan manual. Secara tidak langsung, Poulantzas dalam neomarxis menekankan kelas sebagai relasi sosial.¹⁵

Berbeda dengan konsep kelas dalam neomarxis di mana kelas dilihat sebagai suatu relasi sosial dengan pendekatan terhadap wilayah ekonomi, politik dan ideologi. Max Weber mengidentifikasi kelas dengan menggunakan pendekatan multi

¹⁴ Piötr Sztompka, *Op. cit.*, hal. 189-190.

¹⁵ Ricard Harker, et.al, (*Habitus X Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizer, Jalasutra, Yogyakarta, hal. 141-142.

dimensional.¹⁶ Kelas sosial menurut Weber didasarkan pada ukuran kehormatan. Kelompok ini didefinisikan oleh Weber sebagai kelompok yang anggotanya memiliki gaya hidup tertentu dan mempunyai tingkat penghargaan sosial tertentu pula.¹⁷ Stratifikasi tersebut didasarkan pada 3 (tiga) unsur pokok, yaitu kekuasaan, kekayaan dan prestise. Seseorang bisa memiliki prestise atau posisi sosial yang tinggi apabila dapat merepresentasikan salah satu dari ketiga faktor tersebut. Bagi Weber, masyarakat merupakan produk dari tindakan-tindakan individu yang berbuat dalam kerangka fungsi nilai, motif dan kalkulasi rasional. Jika menjelaskan tentang sosial berarti harus memahami cara manusia mengorientasikan tindakannya dengan cara melakukan interpretasi atas aktivitas sosial.¹⁸

Pada intinya Weber menafsirkan masyarakat menurut pola-pola tindakan bermakna para anggotanya. Weber membedakan tindakan dari tingkah laku pada umumnya dengan mengatakan bahwa sebuah gerakan bukanlah sebuah tindakan kalau gerakan tersebut tidak memiliki makna subyektif untuk orang yang bersangkutan.¹⁹

Klasifikasi tindakan bermakna tersebut oleh Weber disebut sebagai metode "tipe ideal". Weber menjelaskan tipe-tipe besar aktivitas manusia melalui tindakan tradisional yang terkait dengan adat istiadat, tindakan afektif yang digerakkan oleh

¹⁶ Jean-Francois Dortier, *Loc. cit.*

¹⁷ J.Dwi Darmoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 155.

¹⁸ Jean-Francois Dortier, *Op. cit.*, hal. 36.

¹⁹ Riyadi Soeprpto, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif sosiologi Modern*, Averroes Press, Yogyakarta, 2002. hal. 46-47.

napsu, dan tindakan rasional yang merupakan alat (instrumen) yang ditujukan ke arah nilai atau tujuan yang bermanfaat dan berimplikasi pada kesesuaian antara cara dan tujuan. Strategi terakhir ini menurutnya bersifat rasional dalam hal penyesuaian efektivitas tindakan yang lebih baik dan diarahkan ke tujuan materiil atau diorientasikan lewat nilai-nilai.²⁰ Menurut Weber tindakan rasional menjadi ciri masyarakat modern, yaitu mewujudkan dirinya sebagai pengusaha kapitalis, ilmuwan, konsumen, atau pegawai yang bekerja dan bertindak sesuai dengan logika tersebut.²¹

D.2 Kelas Sosial Bourdieu; Kontestasi Tingkah laku Konsumsi dan Identitas

Dalam menganalisa suatu kelas beserta praktiknya, Pierre Bourdieu mengembangkan suatu pendekatan strukturalisme generatif di mana pendekatan ini menggunakan cara berpikir relasional antara struktur objektif dan representasi subjektif.²² Dapat dikatakan strukturalisme generatif merupakan analisis struktur-struktur objektif yang tidak dapat dipisahkan dari asal usul struktur-struktur mental dalam diri individu biologis yang sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri.²³ Secara tidak langsung, Bourdieu dapat dikatakan mendialektikkan struktur-struktur objektif yang tampil sebagai suatu realitas sosial yang berada dalam ruang sosial dengan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain, berupa disposisi yang ada dalam diri individu.

²⁰ Jean-Francois Dortier, *Op. cit.*, hal. 36-37.

²¹ *Ibid.*

²² Richard Harker, et.al, *Op. cit.*, hal. xxiii.

²³ Haryatmoko, *Op. cit.*, hal. 8.

Suatu praktik sosial tidak dapat begitu saja dijelaskan sebagai produk dari struktur atau agensi sebagai subyek. Untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara agensi dan struktur tersebut, Bourdieu mengajukan konsep habitus dan ranah. Bourdieu mengartikan habitus sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Sedangkan ranah diartikan sebagai jaringan relasi posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual.²⁴ Habitus dan ranah adalah perangkat konseptual utama karena saling mengandaikan hubungan dua arah, struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang sosial) dan struktur habitus yang telah terintegrasi pada pelaku²⁵ dan ditunjang oleh sejumlah ide lain yang mendukung dan berada di dalam suatu perjuangan posisi yang dilakukan dalam medan perjuangan (arena).

Arena menurut konsep Bourdieu juga dapat diartikan sebagai suatu gelanggang, di mana di dalam arena ini terjadi perjuangan dan manuver-manuver untuk memperebutkan sumber atau pertarungan dan akses terbatas. Arena didefinisikan sebagai taruhan yang bisa meliputi benda kultural (gaya hidup), perumahan, kemajuan intelektual (pendidikan), pekerjaan, tanah, kekuasaan (politik), kelas sosial, prestise atau lainnya.²⁶ Secara fundamental, ruang atau arena-arena ini menjadi tempat persaingan dan pergulatan dalam perjuangan untuk meraih posisi-

²⁴ Richard Harker, et.al, *Op. cit.*, hal. xvii-xviii.

²⁵ Haryatmoko, *Op. cit.* hal. 11.

²⁶ Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Bourdieu*, terj. Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 124.

posisi sosial dalam masyarakat atau dapat dikatakan, arena merupakan tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi..

Teori yang dikembangkan oleh Bourdieu dalam melihat suatu praktik-praktik yang direpresentasikan oleh kelas-kelas dalam ruang sosial mengalami keterputusan dengan beberapa tradisi sosiologis baik dari Marx maupun dari Weber, walaupun dalam teorinya jelas memperoleh inspirasi dari tokoh-tokoh tersebut. Menurutnya teori Marx tentang kelas tidak mencukupi karena tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan objektif yang menurut Bourdieu sangat ditentukan oleh modal-modal seperti ekonomi, budaya, simbolik, dan sosial. Teori Marx hanya mendefinisikan posisi-posisi sosial dengan mengacu pada satu posisi dalam hubungan-hubungan produksi ekonomi dan mengabaikan hubungan-hubungan produksi budaya. Sedangkan dari Weber, Bourdieu mengembangkan apa yang disebut sebagai tindakan bermakna. Dimensi simbolis yang oleh Weber dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan (tradisional, Karismatik, legal-rasional) untuk menghindari kekerasan, oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme dominasi. Makna dan simbol sangat berperan untuk menjelaskan tentang kekerasan simbolik.²⁷

Dalam representasi teori yang dikemukakan oleh Bourdieu, dunia sosial digambarkan dalam bentuk ruang dengan beberapa dimensi yang mendasarkan pada prinsip diferensiasi dan distribusi. Para pelaku dan kelompoknya didefinisikan oleh posisi-posisi mereka dalam ruang sosial. Terdapat masyarakat yang menguasai

²⁷ Haryatmoko, *Op. cit.*, hal. 9.

(mendominasi) dan masyarakat yang dikuasai (didominasi). Setiap pelaku ditempatkan pada posisi atau kelasnya yang ditentukan oleh dua dimensi, yaitu menurut besarnya (volume) modal yang dimiliki, dan sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal yang dimiliki (struktur modal yang dimiliki).²⁸

Struktur modal yang dikemukakan oleh Bourdieu membagi modal-modal tersebut ke dalam empat kategori, yaitu (1) modal ekonomi dapat berupa investasi, warisan dan penghasilan; (2) modal budaya dapat berupa ijazah, pengetahuan yang telah diperoleh; (3) modal sosial berupa berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang bermakna; (4) modal simbolis berupa prestise dan gengsi sosial yang dalam representasinya dapat berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Di antara berbagai macam modal tersebut, modal ekonomi dan budaya adalah yang paling menentukan dalam kriteria diferensiasi pada masyarakat yang sudah maju.²⁹ Besar dan komposisi struktur modal yang dimiliki oleh pelaku pada praktiknya, digunakan untuk melakukan perjuangan posisi dalam suatu arena sehingga pelaku tersebut dapat menempati posisi atau kelasnya dalam arena yang ditempatinya.

Konsep kelas yang ditawarkan oleh Bourdieu dalam teori relasional kelas, membagi kelas berdasarkan kekhasan masing-masing kelas sosial yang terkait dengan kategori sosio-profesional. Pertama, kelas dominan yang ditandai oleh besarnya kepemilikan modal dengan mengakumulasi berbagai modal. Mereka menunjukkan

²⁸ *Ibid*, hal. 11-12.

²⁹ Richard Jenkins, *Op. cit.*, hal. 125.

perbedaannya untuk mengafirmasi identitas khasnya dan memaksakan kepada semua dengan melegitimasi suatu visi dunia sosial dalam definisi dan menentukan budaya yang sah. Kelompok kedua adalah kaum borjuasi kecil atau yang biasa disebut sebagai kelas menengah. Mereka masuk dalam kelompok borjuasi karena memiliki kesamaan sifat dengan kaum borjuasi, yaitu keinginan untuk menaiki tangga sosial. Mereka sangat menonjolkan keinginan atau kehendak baik dalam hal budaya, meski mendasarkan peniruan terhadap budaya kelas dominan. Dan kelompok ketiga adalah kelas populer yang ditandai dengan tiadanya kepemilikan modal. Mereka hampir tidak memiliki keempat jenis modal. Nilai yang menyatukan mereka ialah sejumlah praktik dan representasi yang menemukan makna dalam keunggulan fisik dan penerimaan dominasi.³⁰

Ketika seseorang telah berada dalam posisinya dalam struktur kelas, maka habitus yang dimiliki oleh pelaku akan menyesuaikan dengan posisinya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi habitus yang merupakan disposisi yang dapat berubah-ubah, ia mampu menggerakkan, bertindak, dan mengorientasikan sesuai dengan posisi yang ditempati pelaku dalam lingkup sosial.³¹ Konsepsi habitus kelas ini memberikan suatu disposisi ke arah praktik sosial kelas. Disposisi tersebut merepresentasikan selera untuk dapat membedakan diri dan mengapresiasinya dalam bentuk struktur konsumsi yang memiliki makna dalam hubungan kekuasaan (relasi kekuasaan) sebagai suatu strategi untuk mempertahankan kekuasaan.

³⁰ Haryatmoko, *Op. cit.*, hal. 12-13.

³¹ *Ibid*, hal. 11.

Strategi yang dilakukan dengan pendekatan struktur konsumsi tersebut menyangkut tiga hal yang dikenal sebagai tiga struktur konsumsi yang meliputi konsumsi makanan di mana pilihan jenis makanan, jumlahnya, dan cara makan menunjukkan diri berasal dari kelas mana, konsumsi penampilan, menyangkut cara penampilan, cara memilih bahan yang dipakai, dan konsumsi budaya yang menyangkut hiburan, tontonan, musik, dan sebagainya.³²

Secara tidak langsung, strategi yang diterapkan oleh pelaku sangat tergantung pada besarnya modal yang dimiliki dan juga struktur modal dalam posisinya dalam lingkup sosial. Mereka yang berada pada posisi dominan biasanya cenderung melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan. Para pelaku demi keuntungan perjuangannya akan berusaha mengubah aturan main, bisa dengan mendiskreditkan bentuk-bentuk modal yang menjadi kekuatan tumpuan lawan atau subversi (versi-versi kecil), strategi ini terutama dipakai oleh mereka yang didominasi. Setiap orang atau kelompok akan berusaha mempertahankan dan memperbaiki posisinya, membedakan diri, mendapatkan posisi baru. Perjuangan posisi ini mengandaikan suatu pertarungan sosial juga dalam ranah simbolis.³³

Pada hakikatnya, suatu strategi kekuasaan untuk mendominasi arena perjuangan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan posisi dalam kelas sosial. Mekanisme dominasi tersebut tidak dapat bertahan lama apabila strategi yang diterapkan oleh aktor tidak disesuaikan dengan standar perubahan yang berlangsung

³² *Ibid*, hal. 13.

³³ *Ibid*, hal. 15.

terus-menerus karena perkembangan yang terjadi dalam ruang sosial selalu menuntut seseorang harus sesuai dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Keadaan ini menuntut pelaku untuk selalu berusaha mempertahankan dan mendapatkan berbagai bentuk modal dan usaha tersebut cenderung dilakukan melalui reproduksi sosial³⁴ yang merupakan reproduksi struktur lingkup dan hubungan-hubungan sosial yang berbasis pada keluarga.

Reproduksi sosial tersebut meliputi tiga strategi pokok, yaitu (1) strategi investasi biologis sebagai upaya untuk mengontrol jumlah keturunan untuk menjamin pewarisan modal dan memudahkan kenaikan pangkat; (2) strategi pewarisan yang berfungsi untuk menjamin kekayaan (tanah, toko, uang) karena modal ekonomi menentukan dengan relasi kekuasaan (hubungan kekuasaan), dan (3) strategi pendidikan yang mau mengarah pada usaha untuk menghasilkan pelaku sosial yang "mumpuni" (teladan) agar mampu menerima warisan kelompok atau mampu memperbaiki jenjang sosial.

Dalam menganalisa tingkah laku konsumsi yang direpresentasikan oleh aktor ataupun kelas menengah di Yogyakarta sesuai dengan pendekatan terhadap konsep Pierre Bourdieu, penulis menggambarkan tingkah laku konsumsi dengan segala representasinya sebagai suatu bentuk dari strategi yang memiliki hubungan kekuasaan (relasi sosial) dan digunakan dalam perjuangan posisi pada tiap-tiap arena yang ditempati aktor. Strategi tersebut digunakan sebagai upaya untuk membedakan diri

³⁴ *Ibid.*

dengan kelas lainnya melalui tiga struktur konsumsi di mana besar dan komposisi struktur modal yang dimiliki oleh aktor memiliki pengaruh yang besar dalam dominasi pada suatu arena. Keadaan lain yang dapat ditemui adalah tidak tertutupnya kemungkinan adanya penggunaan reproduksi sosial sebagai sebuah strategi oleh aktor karena gerak masyarakat bersifat dinamis. Ketika seseorang telah berada pada posisinya dalam suatu kelas, habitusnya cenderung menyesuaikan dengan posisi tersebut sehingga praktik yang direpresentasikan oleh aktor juga menyesuaikan dengan selera kelas yang ditempatinya.

Selera merupakan suatu disposisi, yang secara tidak langsung menjadi suatu habitus yang mengarahkan pada praktik-praktik kehidupan, dalam hal ini praktik tersebut memiliki pendekatan dengan praktik konsumsi kelas. Dengan menjadi produk pengkondisian yang berhubungan dengan kategori syarat eksistensi tertentu, selera menyatukan semua orang yang menjadi produk kondisi serupa sambil membedakan diri dari orang lain. Selera membedakan dengan cara yang esensial, karena selera adalah basis bagi semua yang dimiliki orang-orang dan benda-benda dan semuanya diperuntukkan bagi orang lain, sementara orang mengklasifikasikan dirinya, pada saat yang sama dia juga diklasifikasikan oleh orang lain. Dengan kata lain, selera adalah salah satu dari penanda kunci dan elemen identitas sosial. Jadi, representasi praktik aktor secara tidak langsung mencerminkan selera (disposisi) kelas sosialnya sehingga identitasnya sebagai bagian dari kelas tertentu menjadi jelas dalam praktik tersebut.

Praktik-praktik yang direpresentasikan oleh aktor merupakan hasil pembelajaran yang berlangsung secara terus menerus. Pada saat ia berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan internal, aktor memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembelajaran tersebut, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tempat bekerja, dan lingkungan lainnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran media massa sebagai agen budaya dan industri-industri *modern* yang berkembang dalam menyumbangkan gaya hidup dalam masyarakat yang direpresentasikan oleh kelas-kelas dalam struktur sosial dalam praktik-praktiknya.

D.3 Kelas-kelas Sosial di Indonesia dan Tingkah Laku Konsumsi

Struktur kelas yang terdapat di Indonesia tidak terbentuk dan tersosialisasi dalam masyarakat tanpa adanya campur tangan dari sistem penggolongan pada masa kerajaan di Jawa dan pengaruh kolonial Belanda yang menjajah selama ±350an tahun. Bangsa kolonial banyak memiliki pengaruh dalam merombak struktur lama dan menciptakan lapisan-lapisan baru dalam masyarakat beserta sosialisasi struktur birokrasi pemerintahan yang bersifat *patrimonial*.

Pada awalnya, struktur kelas dalam masyarakat Indonesia yang disumbangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Mataram membagi masyarakat menjadi dua bagian, yaitu lapisan atas atau merupakan kelas *elite* ditempati oleh orang-orang yang berasal dan berada dalam wilayah kerajaan yang merupakan kelas yang memerintah dan golongan bawah ditempati oleh masyarakat biasa yang merupakan mayoritas

penduduk atau kelas yang diperintah dengan berbagai profesi seperti petani, perajin, buruh atau tukang.³⁵

Struktur kelas awal dalam masyarakat ini bertahan hingga kolonial Belanda memperluas ekspansi militernya ke Jawa dan menyumbang berbagai perubahan yang diikuti pula oleh perubahan dalam struktur kelas dalam masyarakat hingga berakhirnya Perang Dunia ke II. Pada umumnya orang Jawa yang tinggal di kota dibagi ke dalam tiga lapisan sosial, yaitu: (1) golongan orang biasa dan pekerja kasar; (2) golongan pedagang; dan (3) golongan pegawai pemerintah yang bekerja di kantor pemerintah daerah, di instansi-instansi pemerintah, dan orang-orang yang menduduki jabatan kepegawaian, yang bekerja di belakang meja tulis. Sebelum Perang Dunia ke II, di Yogyakarta dan Surakarta, di Negarigung, dan di Cirebon di daerah Pesisir Barat, masih ada satu golongan sosial lain, yaitu kaum bangsawan Jawa.³⁶

Struktur-struktur kelas yang telah tersosialisasi dalam masyarakat ini tetap bertahan hingga awal pemerintahan Orde Baru yang selanjutnya diikuti oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan-kemajuan dan perluasan-perluasan dalam pekerjaan, baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang perekonomian yang disertai dengan munculnya industri-industri *modern* di dalam negeri yang mempunyai pengaruh dalam membentuk gaya hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan suatu inovasi oleh karena suatu perbaikan yang

³⁵ Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial Di. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*, CV. Manggala Bhakti, Jakarta, 1993, hal. 36.

³⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 230-231.

terus-menerus dalam kinerja ekonomi menuntut seseorang harus sesuai dengan standar perubahan yang terus-menerus (posisi-posisi baru dalam struktur sosial dan ekonomi).³⁷

Survei berbagai badan pemasaran internasional menyebutkan, di Indonesia pada 1996 baru terdapat 15 juta orang Indonesia yang tergolong lapisan menengah "menurut ukuran Indonesia". Ada sekitar 1 juta orang Indonesia yang memiliki kartu kredit, memiliki sedikitnya satu rumah, satu mobil pribadi, dan mampu berlibur ke luar negeri satu kali setiap tahun. Sedikitnya ada 2,5 juta rumah tangga (kurang lebih 14 juta orang) yang pengeluaran bulannya sekitar Rp. 350.000 sampai Rp. 800.000. Dipukul rata, pendapatan mereka antara Rp. 1 juta dan 3 juta sebulan. Diantara 15 juta orang yang berada di atas garis kenikmatan, yang kalau dipukul rata, pendapatan bersihnya sekurang-kurangnya Rp. 5 juta-8 juta per bulan.³⁸ Dan di dalam pendataan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk penyaluran dana kompensasi BBM (bahan bakar minyak) beberapa waktu lalu, mereka yang dapat dikategorikan masyarakat miskin dalam tabel sebagai berikut:³⁹

³⁷ Haryatmoko, *Loc. cit.*

³⁸ Lihat Artikel Juwono Sudarsono, "Demokrasi Lapisan Menengah", Sumber: <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/01/10/0036.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2005.

³⁹ Lihat Artikel pada Harian Media Indonesia, Kamis, 29 September 2005 yang berjudul "Si Miskin Menanti Dengan Cemas", hal.17.

Tabel 1
Mereka yang Disebut Miskin

Jenis	Pengeluaran untuk makanan	Setara dengan (bulan/orang)	Jumlah (keluarga)	Setara dengan (jiwa)
Sangat Miskin	< 1.900	Rp 120 ribu	4 juta	16 juta
Miskin	1.900-2.100	Rp 150 ribu	6 juta	24 juta
Mendekati miskin	2.00-2.300	Rp 175 ribu	5,5 juta	22 juta
TOTAL			15,5 juta	62 juta

Sumber: Media Indonesia, Kamis 29 September 2005.

Kelas-kelas sosial yang terbentuk dalam masyarakat tersebut memiliki perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Kepemilikan akses dan komposisi modal seorang aktor mempunyai peran yang cukup dominan di dalam membagi masyarakat sesuai dengan kedudukannya dengan kategori dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga identitasnya dapat tercermin dalam perilaku yang ditonjolkannya menjadi jelas.

E. Metodologi Penelitian

E.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan antara metode survei dan kualitatif. Di mana Penggabungan metode tersebut diharapkan dapat saling melengkapi antara satu dengan lainnya sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian yang memperlihatkan hubungan-hubungan antar variabel yang diteliti, sekaligus untuk mengetahui kecenderungan yang tampak pada objek yang diteliti. Pengaplikasian metode survei, dengan bantuan kuesioner ini, dilakukan dengan mengambil sampel

dari beberapa pemukiman yang berada di wilayah Yogyakarta. Sedangkan pengaplikasian penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan mengambil beberapa informan secara acak dari data hasil survei dan melakukan wawancara secara mendalam. Dengan demikian, akan didapatkan data secara deskriptif berkaitan dengan tema kelas sosial, tingkah laku konsumsi dan identitas.

E.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada beberapa lokasi pemukiman tempat tinggal penduduk di Yogyakarta, terutama pada wilayah perumahan-perumahan, seperti Jogja Regency, Casa Grande, Tirtasani, Candi Sari, Taman Cemara, dan didukung pula oleh dua pemukiman rumah penduduk lainnya, seperti Jagalan Ledoksari atau yang biasa dikenal sebagai Kali Code dan Suryo Putran yang terletak tepat di belakang keraton Yogyakarta. Pengambilan dua wilayah pemukiman tersebut dalam penelitian, oleh karena adanya kemungkinan menyebarnya anggota kelas menengah pada dua lokasi tersebut.

Dengan pemilihan penelitian pada beberapa lokasi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan tingkah laku konsumsi mereka sebagai bagian dari representasi identitas kelasnya.

E.3 Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya.⁴¹ Populasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang menempati beberapa lokasi pemukiman yang diteliti, terutama orang yang telah memiliki pekerjaan (mata pencaharian).

E.4 Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel penelitian, peneliti menggunakan pendekatan personal terlebih dahulu kepada beberapa orang atau tokoh kunci yang memiliki wewenang dalam wilayah yang diteliti, seperti ketua RT dan ketua paguyuban pada pemukiman-pemukiman tersebut, sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan warga lainnya. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua populasi pada pemukiman yang diteliti bersedia untuk dijadikan sampel dan masih banyaknya pemukiman-pemukiman yang belum padat dengan populasinya sehingga agak menyulitkan dalam pemilihan dan pengambilan sampel, terutama sampel yang mendukung data kualitatif dengan wawancara secara mendalam. Secara garis besar,

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Pertama, Kencana Jakarta, 2005, hal. 99.

⁴¹ *Ibid*, hal. 100.

teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive random sampling*. Jumlah populasi yang mendukung penelitian dan dijadikan sampel adalah 80 responden yang mendukung metode survei dengan bantuan kuesioner dan diambil delapan responden untuk wawancara secara mendalam yang mendukung metode kualitatif.

E.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.⁴² Metode pengumpulan data dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. **Data primer** adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini hasil wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur dijadikan sebagai data primer dan didukung oleh hasil daripada data kuantitatif yang dapat menggambarkan kecenderungan yang ingin dilihat dalam penelitian ini. Metode survei dengan bantuan kuesioner (angket) adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden, dan setelah diisi angket akan dikembalikan kepada petugas atau peneliti.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal. 123.

⁴³ *Ibid*, hal. 122.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 123.

b. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁴⁵ Data-data ini biasanya diperoleh melalui buku-buku literatur, internet, koran, majalah, dokumen, data-data statistik statistik dan dari hasil penelitian sebelumnya.

E.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁶ Tahap Pertama dimulai dengan mengkodekan tiap-tiap variabel yang terdapat dalam kuesioner untuk memudahkan dalam memasukkan data-data (*entry data*). Setelah mengkodekan seluruh pertanyaan, tahap berikutnya yang dilakukan adalah memasukkan data mentah dari hasil pengambilan sampel di lapangan dengan bantuan kode-kode pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan klasifikasinya. Setelah selesai memasukkan data, tahap terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan data statistik deskriptif adalah dengan memasukkan variabel-variabel dalam yang dibutuhkan dalam kotak analisa deskriptif sehingga akan dapat diperoleh data untuk menggambarkan kecenderungan data yang deskriptif.

Proses selanjutnya dalam analisis data adalah dengan mengklasifikasikan data-data hasil wawancara dan hasil catatan lapangan yang penting ke dalam tulisan yang terlebih dahulu melalui beberapa tahap, seperti memasukkan hasil wawancara

⁴⁵ Ibid, hal. 122.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 263.

dan catatan tersebut dalam daftar yang berbeda dan mengkategorikannya dalam matriks (kolom). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan menemukan temuan-temuan lapangan penting dan membantu untuk melihat makna-makna lain yang muncul dan terkadang tidak terlihat pada saat berada di lapangan.

Untuk menunjang dan membantu proses analisis, digunakan beberapa arsip data yang berasal dari beberapa literatur, koran, majalah, dan media internet, dan data statistik BPS. Penggunaan arsip-arsip tersebut sangat membantu di dalam menguatkan analisis, khususnya yang memperlihatkan gambaran keadaan-keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti, seperti keadaan-keadaan yang terjadi pada masa penjajahan dan keadaan-keadaan lain yang terjadi di luar wilayah penelitian. Pada hakikatnya, penggabungan antara temuan survei dengan kualitatif, cenderung digambarkan penulis dalam bentuk deskriptif kualitatif, di mana data kuantitatif digunakan untuk membaca kecenderungan yang lebih besar (makro), dan data kualitatif lebih memperlihatkan suatu gambaran yang lebih mendalam (mikro). Penggabungan fenomena kedua dalam analisis data akan lebih dapat menemukan komprehensif masalah.